



Pemda Jamin Tak Naikkan Retribusi

JOGJA—Pemerintah daerah di DIY lebih memilih menekan belanja instansi dibandingkan dengan mendongkrak pendapatan dengan menaikkan retribusi atau pajak di tengah efisiensi yang digencarkan Pemerintah Pusat.

Ariq Fajar Hidayat, David Kurniawan, & Yosef Leon
redaksi@harianjogja.com

▶ Wali Kota Jogja mengaku kerap menerima keluhan warga soal tingginya beban pajak maupun retribusi, sehingga langkah itu dinilai kurang tepat.

▶ Banggar DPR mengingatkan pemerintah agar tidak menaikkan tarif pajak guna mengejar kenaikan target penerimaan perpajakan pada RAPBN 2026.

Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, mengatakan pembangunan daerah tidak sepenuhnya bergantung pada Pemerintah Pusat. Meski anggaran berpotensi berkurang drastis, Pemkot Jogja belum berencana menutupi kekurangan dengan menaikkan retribusi atau pajak daerah.

▶ Halaman 10

~Pemda Jamin...

Hasto mengaku kerap menerima keluhan warga soal tingginya beban pajak maupun retribusi, sehingga langkah itu dinilai kurang tepat. "Belum ada [rencana kenaikan tarif], hari-hari saya sudah sering menerima keluhan masyarakat terlalu tinggi retribusinya, terlalu tinggi pajaknya, jadi kalau bisa malah memberi diskon," ujar Hasto, Jumat (22/8).

Sebagai gantinya, efisiensi internal dipilih sebagai strategi menghadapi keterbatasan anggaran. Hasto menyebut sejumlah pos belanja rutin sudah ditekan, mulai dari perjalanan dinas hingga kebutuhan perkantoran. "Perubahannya signifikan menurut saya, kita mengurangi perjalanan dinas, dan pembelian alat-alat tulis, alat kantor kan direduksi hampir 10 persen," jelasnya.

Selain itu, Hasto menilai gotong royong menjadi kunci utama dalam memajukan daerah. Ia mencontohkan pengalamannya sebagai kepala daerah, di mana mayoritas keberhasilan program turut mendapat andil dari masyarakat. "Saya merasakan selama jadi kepala daerah di Kulonprogo, Kota Jogja, atau waktu saya di BKKBN itu 70 persen keberhasilan program ditentukan oleh warga masyarakat, kecuali memang infrastruktur besar," jelasnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono memastikan hingga sekarang tidak membuka opsi untuk menaikkan pajak maupun retribusi daerah. "Masih sama

tidak ada kenaikan. Contohnya untuk PBB-P2, pajaknya masih tetap sama," kata Putro.

Ia mengakui tetap ada upaya optimalisasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki. Salah satunya dengan menjalankan program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah. "Ini bukan menaikkan, tapi untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki agar pendapatan yang diraih dapat lebih dimaksimalkan," katanya.

Disinggung mengenai PAD yang diraih di tahun ini, ia mengakui ditarget sekitar Rp301 miliar. Ia optimistis dengan berbagai program yang dipersiapkan dapat terpenuhi di akhir tahun nanti. "PAD menjadi opsi karena dana transfer dari Pemerintah Pusat memang banyak dipangkas. Jadi, lewat optimalisasi PAD diharapkan mampu menjadi penopang program pembangunan agar tetap berjalan," katanya.

Tekan Kebocoran

Wakil Ketua DPRD Bantul, Agung Laksmono mengatakan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan penggunaan APBD agar lebih tepat sasaran. "Kalau kebijakan pusat jadi direalisasikan, kami di daerah harus memperkuat pemanfaatan APBD untuk hal-hal prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat," ujar Agung, Jumat.

Agung menyebut salah satu langkah yang akan ditempuh adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan memperkecil potensi kebocoran pada sektor yang sudah berjalan, seperti pajak dan retribusi pariwisata. "Kami dorong optimalisasi PAD, tapi tetap ada catatan jangan sampai memberatkan masyarakat. Potensi wisata juga akan kami maksimalkan agar mendatangkan lebih banyak wisatawan dan menggerakkan ekonomi," ungkapnya.

Terkait dengan penganggaran tahun depan, Agung menyatakan Bantul masih menggunakan pola defisit dengan proyeksi mencapai 9%–10% pada 2026. Jika benar terjadi pemangkasan dana transfer, DPRD dan Pemkab Bantul akan melakukan rasionalisasi belanja. "Kalau dana transfer berkurang, mau tidak mau kami harus melakukan efisiensi. Namun fokus belanja tetap untuk kepentingan masyarakat," kata Agung.

Beratkan Masyarakat

Sementara itu, Banggar DPR mengingatkan pemerintah agar tidak menaikkan tarif pajak guna mengejar kenaikan target penerimaan perpajakan pada RAPBN 2026.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menuturkan terdapat kenaikan target perpajakan pada RAPBN 2026 menjadi Rp2.692,02 triliun dari target 2025 yang senilai Rp2.387,3 triliun. "Apalagi kondisi perekonomian rakyat sedang tidak baik-baik saja," kata Said. (Bisnis.com/Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005